



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1032, 2020

LKPP. Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pencipta arsip perlu membuat pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.

5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
6. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
7. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
9. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
10. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
11. Biasa/Umum/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
12. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
13. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro dan apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif,

hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

14. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
15. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
16. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari LKPP.
17. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar LKPP.
18. Tempat Penyimpanan Arsip Aktif yang selanjutnya disebut *Central File* adalah tempat yang dirancang untuk menyimpan Arsip Aktif secara efisien, efektif, dan aman.
19. Pusat Arsip yang selanjutnya disebut *Records Center* adalah suatu bangunan atau ruangan yang dirancang sebagai pusat penyimpanan dan pelayanan Arsip Inaktif.

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP mencakup:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi Biasa/Umum/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia;
- b. Pengamanan Arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola Arsip, serta daftar informasi Terbatas, dan Rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan akses Arsip, memuat Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.

Pasal 3

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP dimaksudkan untuk:

- a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan Arsip Dinamis di unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar Arsip aktifnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan reliabilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP bertujuan untuk:
- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di LKPP;
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. tersedianya informasi LKPP yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan Lampiran Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 - d. terjaminnya keamanan Arsip bagi Informasi yang Dikecualikan; dan
 - e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di LKPP.

Pasal 4

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di LKPP dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan

kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.

- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta prosedur operasional standar, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Pasal 5

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Arsip yang tercipta di LKPP dapat diklasifikasikan menjadi informasi Biasa/Umum/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia;
- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. Arsip Dinamis di LKPP dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal;
- e. setiap Pengguna Internal hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; dan
- f. Pengguna Eksternal dapat mengakses informasi LKPP yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Umum/Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar Arsip aktif, daftar Arsip inaktif, daftar aset, daftar Arsip terjaga dan daftar Arsip vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 7

- (1) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip yang bertugas mengelola Arsip harus merupakan pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Utama LKPP.

Pasal 8

- (1) Arsip Dinamis LKPP terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yang meliputi:
 - a. Biasa/Umum/Terbuka;
 - b. Terbatas; dan
 - c. Rahasia.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
 - a. Teknis pengamanan; dan
 - b. Pengaturan akses.

Pasal 9

Arsip Dinamis di LKPP yang termasuk dalam kategori Arsip Biasa/Umum/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja antara lain:

- a. Arsip Dinamis dari Sekretariat Utama LKPP;
- b. Arsip Dinamis dari Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan yang meliputi Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, dan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
- c. Arsip Dinamis dari Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi yang meliputi Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, dan Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Arsip Dinamis dari Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia yang meliputi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dan Direktorat Sertifikasi Profesi;
- e. Arsip Dinamis dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa meliputi Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
- f. Arsip Dinamis dari Inspektorat; dan
- g. Arsip Dinamis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 10

Arsip Dinamis di LKPP yang termasuk dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di LKPP jika diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Pasal 11

Arsip Dinamis di LKPP yang termasuk dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mengandung dampak yang luas dan serius sehingga mengganggu kinerja LKPP.

Pasal 12

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas/*Closed Circuit Television (CCTV)*, kunci pengaman ruangan, dan media simpan Arsip.
- (2) Pengamanan Arsip kategori Biasa/Umum/Terbuka disimpan pada rak besi, Arsip kategori Terbatas disimpan pada *filing cabinet*, dan Arsip kategori Rahasia disimpan pada lemari besi tahan api.

Pasal 13

- (1) Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Sekretariat Utama dan Pengelola Arsip Aktif (PAA) di *Central File*.
- (2) Arsiparis sebagai pengelola Arsip inaktif berperan dalam Pengamanan Arsip di *Record Center* (Pusat Arsip).
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola Arsip di *Central File*.

Pasal 14

- (1) Pengamanan informasi Arsip Dinamis di LKPP meliputi pembuatan daftar Arsip yang disusun dari Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagai berikut:
 - a. daftar Arsip informasi publik dari Arsip Dinamis yang berkategori terbuka; dan
 - b. daftar Arsip Terbatas dan Rahasia, dari Arsip Dinamis yang berkategori tertutup.
- (2) Tujuan Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan acuan pembatasan akses

yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Record Centre* dan *Central File*.

Pasal 15

- (1) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif di LKPP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Substantif tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 16

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris Utama dan Deputi;
 - c. Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur;
 - d. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan Staf; dan
 - e. Pengawas Internal.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada di LKPP.
- (3) Sekretaris Utama dan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berwenang:
 - a. mengakses Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah di bawah kewenangannya; dan
 - b. tidak dapat mengakses Arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya.
- (4) Sekretaris Utama dan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengakses Arsip yang berada di luar

kewenangannya, setelah mendapatkan izin dari Pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.

- (5) Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi Biasa/Terbuka.
- (6) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berwenang mengakses seluruh Arsip di LKPP dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf d, meliputi:
 - a. pengawas eksternal;
 - b. aparat penegak hukum; dan
 - c. publik.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berwenang mengakses seluruh Arsip di LKPP dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang mengakses Arsip di LKPP yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
- (4) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengakses Arsip di LKPP yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI
 KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH

**KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	KODE KLASIFIKASI	SERIES / JENIS DOKUMEN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	KP KP 01	KEPEGAWAIAN Formasi Pegawai	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	01.01	Usulan dari Unit Kerja	Biasa/Umum/	Eselon III	Tidak memiliki	Bagian Kepegawaian

			Terbuka		dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
01.02	Usulan Permintaan Formasi Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara					Bagian Kepegawaian
01.03	Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi					Bagian Kepegawaian
01.04	Penetapan Formasi Aparatur Sipil Negara					Bagian Kepegawaian
01.05	Penetapan Formasi Khusus					Bagian Kepegawaian
KP 02	Pengadaan Pegawai					
02.01	Proses Penerimaan Pegawai meliputi: - Pengumuman - Seleksi Administrasi - Pemanggilan Peserta Tes - Pelaksanaan Ujian Tertulis - Keputusan Hasil Ujian - Wawancara - Pengujian Kesehatan Akhir		Biasa /Umum / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
2						

02.02	Berkas lamaran yang tidak diterima	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
02.03	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) - Surat Lamaran - Ijazah - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) - Kartu Kuning - Surat Keterangan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
02.04	Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil lebih dari 2 (dua) tahun	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
02.05	Surat Keputusan CPNS PNS Kolektif	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
3	KP 03 Pembinaan Karir Pegawai				

03.01	Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai - Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin -Laporan Kegiatan Pengembangan Diri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
03.02	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/Sertifikat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
03.03	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
03.04	Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
03.05	Disiplin Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
03.06	Berkas Hukuman Disiplin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian

	03.07	Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
4	KP 04	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
5	KP 05	Mutasi Pegawai				
	05.01	Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Unit Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	05.02	Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	05.03	Mutasi Keluarga	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	05.04	Usulan Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian

05.05	Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
05.06	Usulan Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
05.07	Peninjauan Masa Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
05.08	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
6	KP 06 Administrasi Pegawai				
06.01	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
06.02	Cuti Besar	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Kepegawaian

					kinerja LKPP	
06.03	Cuti Sakit, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian	
06.04	Cuti Alasan Penting	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian	
06.05	Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian	
06.06	Dokumentasi Identitas Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian	
06.07	Berkas Pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian	

7	KP 07	Kesejahteraan Pegawai	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	07.01	Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	07.02	Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	07.03	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
8	KP 08	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
9	KP 09	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Kepegawaian

10	KP 10	Usul pemberhentian dan penetapan pensiun Pegawai/Janda/Duda dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
11	KP 11	Berkas Perseorangan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
12	KP12	Berkas Perseorangan Kepala Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Kepegawaian
	KU	KEUANGAN				
	A	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
13	KU 01	Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
14	KU 02	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Keuangan

15	KU 03	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk revisinya	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
16	KU 04	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan oleh LKPP	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
17	KU 05	Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
	B	Pelaksanaan Anggaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
18	KU 01	Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Keuangan

19	KU 02	Belanja				kinerja LKPP	
	02.01	Surat Penyedia Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Persediaan (SPPTUP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPPGU)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan	
	02.02	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan data dukung lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan	
	02.03	Pembukuan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan	
	02.04	Daftar Gaji, Kartu Gaji, dan Keterangan Penghasilan	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan	
	02.05	Bukti Setor	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak	Bagian Keuangan	

	<p>02.06</p> <p>Laporan Kas Bendahara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pemeriksaan - Kas/ Register Penutupan Kas - Kuitansi Pembayaran dan Berita Acara Transfer - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara - Laporan Pendapatan - Laporan Keadaan Kredit Anggaran - Laporan Keadaan Kredit Anggaran Bulanan/Triwulanan/Semesteran 	<p>Terbatas</p>	<p>Eselon III</p>	<p>yang mengganggu kinerja LKPP</p>	<p>Bagian Keuangan</p>
	<p>02.07</p> <p>Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal</p>	<p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP</p>	<p>Bagian Keuangan</p>

02.08	Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Realisasi Anggaran (RKA) - Neraca - Laporan Arus Kas (LAK) - Laporan Barang Milik Negara (BMN) - Laporan Realisasi Pendapatan Negara - Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
C	Bantuan/Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan Dalam Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
20	KU 01	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
21	KU.02	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
D	Penatausahaan Keuangan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan

22	KU 01	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
23	KU 02	Salinan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III		Bagian Keuangan
24	KU 03	Laporan Aparat Pemeriksaan Fungsional - Laporan Hasil Pemeriksaan - Memo Hasil Pemeriksaan - Tindak Lanjut/Tanggapan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
25	KU 04	Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara - Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan
	PL	PERLENGKAPAN				
26	PL 01	Rencana Kebutuhan Barang	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Barang Milik Negara

						kinerja LKPP		
	01.01	Rencana Kebutuhan Barang Unit Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara		
	01.02	Rencana Kebutuhan Barang LKPP	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara		
27	PL 02	Pengadaan Barang	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara		
	02.01	Telaahan Pelaksanaan Lelang/Pemilikan/Penunjukan Langsung	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara		
	02.02	Dokumen Lelang	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Barang Milik Negara		

28	PL 03	Penyimpanan Barang dan Distribusi	Terbatas	Eselon III	kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
	03.01	Penyimpanan Inventaris Kekayaan Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
29	PL 04	Pengelolaan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
	04.01	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
	04.02	Pembukuan Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
	04.03	Daftar Barang Ruangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	

						kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
04.04	Inventarisasi Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara		
30	PL 05	Laporan Barang Milik Negara	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara	
05.01	Laporan Kondisi Barang	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara		
05.02	Laporan Barang Kuasa Pengguna	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara		
05.03	Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal dan Internal	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara		

	05.04	Laporan Persediaan Habis Pakai	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	05.05	Laporan Persediaan Tidak Habis Pakai	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	05.06	Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Barang Milik Negara
	RT	RUMAH TANGGA				
31	RT 01	Administrasi Penggunaan/Langganan Daya dan Jasa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
32	RT 02	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, dan Komputer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
33	RT 03	Pemeliharaan Gedung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

34	RT 04	Administrasi Penggunaan Fasilitas Kantor	Terbatas	Eselon III	kinerja LKPP Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
35	RT 05	Administrasi Pengurusan Kendaraan Dinas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
36	RT 06	Pengelolaan Perparkiran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
37	RT 07	Administrasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
38	RT 08	Ketertiban dan Keamanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT				
39	HM 01	Publikasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

	01.01	Pameran		Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	01.02	<i>Press Release</i>		Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	01.03	Publikasi lainnya		Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
40	HM 02	Analisis Berita		Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
41	HM 03	Rapat Dengar Pendapat		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
42	HM 04	Hubungan Antar Kementerian/Lembaga/Daerah/		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

	Instansi				Eselon II	kinerja LKPP	Masyarakat
04.01	Kementerian Negara	Terbatas		Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	
04.02	Lembaga Negara	Terbatas		Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	
04.03	Organisasi Pengadaan Nasional dan Internasional	Terbatas		Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	
04.04	Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Swasta	Terbatas		Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	
04.05	Organisasi Kemasyarakatan	Terbatas		Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	
04.06	Perguruan Tinggi/Sekolah	Terbatas		Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	
04.07	Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	Terbatas		Eselon II	Memiliki dampak	Bagian Hukum dan	

		(Bakohumas)					Hubungan Masyarakat
43	HM 05	Dokumentasi dan Penerbitan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
44	HM 06	Penghargaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
45	HM 07	Kenang-kenangan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	07.01	Luar Negeri	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	07.02	Dalam Negeri	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

46	HM 08	Verifikasi <i>Helpdesk</i> Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	kinerja LKPP Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
47	HM 09	Penyediaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
48	HK	HUKUM				
	HK 01	Program Legalisasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	01.01	Bahan/Materi Program Legalisasi Nasional	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	01.02	Program Legalisasi Pengadaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

49	HK 02	Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terbatas	Eselon III	kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	02.01	Rancangan Undang - Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang - Naskah Akademik - Rancangan awal sampai dengan rancangan akhir - Telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	02.02	Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang, termasuk Naskah Akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, dan telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
50	HK 03	Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

51	HK 04	- Telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
		Rancangan Keputusan /Ketetapan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Rancangan awal sampai dengan rancangan akhir - Telaah hukum sampai dengan ditetapkan				
52	HK 05	Instruksi/Surat Edaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	05.01	Instruksi/Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : - Rancangan awal sampai dengan rancangan akhir - Telaah hukum sampai dengan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

		ditetapkan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
05.02	Instruksi/Surat Edaran Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : - Rancangan awal sampai dengan rancangan akhir - Telaah hukum sampai dengan ditetapkan					
53	HK 06 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk/Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional / Instansional - Rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	
54	HK 07 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	
	07.01 Nota Kesepahaman Dalam Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	

	07.02	Nota Kesepeahaman Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
55	HK 08	Dokumentasi Hukum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
56	HK 09	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	09.01	Berkas Berhubungan dengan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	09.02	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

57	HK 10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
58	HK 11	Kasus/Sengketa Hukum	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	11.01	Pidana	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	11.02	Perdata	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	11.03	Tata Usaha Negara	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

					penyelenggaraan pemerintahan	
	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
59	OT 01	Struktur Organisasi Lembaga Kebijaksanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
60	OT 02	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
61	OT 03	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
62	OT 04	Evaluasi Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
63	OT 05	Analisa Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
64	OT 06	Ketatalaksanaan - Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

					kinerja LKPP	
	PR	PERENCANAAN				
65	PR 01	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
	01.01	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
	01.02	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
	01.03	Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran

01.04	Rencana Strategis (Renstra)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
01.05	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
01.06	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
01.07	Revisi Dokumen Anggaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
01.08	Rencana Umum Pengadaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran

66	PR 02	Program Kerja dan Anggaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
	02.01	Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
	02.02	Program Kerja Tahunan Unit Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
	02.03	Program Kerja Tahunan Lembaga/Instansi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Program dan Anggaran
67	PR 03	Penetapan/Kontrak Kerja				
68	PR 04	Laporan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

04.01	Laporan Berkala, yang terdiri dari : - Laporan Harian - Laporan Mingguan - Laporan Bulanan - Laporan Triwulanan - Laporan Semesteran - Laporan Tahunan Unit Kerja - Laporan Tahunan Lembaga/Instansi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan				
04.02	Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan				
04.03	Laporan Insidental - Peta Unit Kompetensi Standar Kompetensi Kerja Pengadaan Barang/Jasa - Laporan Konsultan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan				

69	PR 05	Evaluasi Program	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
	05.01	Evaluasi Program Unit Kerja			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
	05.02	Evaluasi Program LKPP			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
	PW	PENGAWASAN				
70	PW 01	Manajemen Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.01	Rencana Strategis Inspektorat				
	01.02	Penyusunan Prosedur dan Pedoman	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.03	Perencanaan dan Pemantauan Kegiatan Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat

01.04	Pengelolaan Teknologi Informasi Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
01.05	Pengelolaan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
01.06	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
01.07	Kerjasama dan Koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
01.08	Hasil Manajemen Pengawasan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
71	PW 02 Pelaksanaan Pengawasan				
	01.01 Audit	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat

	01.02	<i>Review</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.03	Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.04	Pemantauan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.05	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.06	Pengaduan Masyarakat	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	01.07	<i>Whistleblowing System (WBS) Internal</i>	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
	TU	TATA USAHA				
	A	Persuratan				
72	TU 01	Administrasi Persuratan	Biasa/Umum/	Eselon III	Tidak memiliki	Bagian Tata Usaha,

			Terbuka		dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Kearsipan dan Rumah Tangga
	B	Kearsipan	Terbatas		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
73	TU 01	Pemeliharaan Arsip - Pemberkasan Arsip Aktif/Vital - Penataan Arsip Inaktif - Penyimpanan dan Alih Media Arsip	Terbatas		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
74	TU 02	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Terbatas		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
75	TU 03	Layanan Arsip				
	04.01	Pemindahan Arsip Inaktif	Terbatas		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
	04.02	Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna	Terbatas		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
	04.03	Penyerahan Arsip Statis	Terbatas		Memiliki dampak	Bagian Tata Usaha,

76	TU 05	Pembinaan Kearsipan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	yang mengganggu kinerja LKPP	Kearsipan dan Rumah Tangga
	C	Keprotokolan				
77	TU 01	Rapat/Rapat Koordinasi /Rapat Koordinasi Teknis	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
78	TU 02	Acara Keprotokolan				
	02.01	Upacara/Acara Kedinasan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
	02.02	Kunjungan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga

	02.03	Agenda Pimpinan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
	02.04	Perjalanan Dinas Pimpinan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga
79	PT	PERPUSTAKAAN				
	PT 01	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	01.01	Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	01.02	Administrasi Pengolahan Deposit Bahan Pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi

80	PT 02	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	02.01	Buku Induk Koleksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	02.02	Daftar Buku Terseleksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	02.03	Daftar Buku Dalam Pesanan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	02.04	Daftar Buku Dalam Permintaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi

02.05	Daftar Penerimaan Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah, Deposit, dan Hibah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
02.06	Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
02.07	Lembar Kerja Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
02.08	Jaringan Kartu Utama	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
02.09	Daftar Tambahan Buku (<i>Assesion List</i>)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi

	02.10	Daftar/Jaringan Kendali (Subyek dan Pengarang)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
81	PT 03	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	03.01	Data dan Statistik Anggota, Pengunjung dan Peminjaman Bahan Pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	03.02	Pertanyaan Rujukan dan Jawaban	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
82	PT 04	Preservasi Bahan Pustaka	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	04.01	Survei Kondisi Bahan Pustaka	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak	Bagian Sistem Informasi

						yang mengganggu kinerja LKPP	Informasi
04.02	Reprografi Bahan Pustaka	Terbatas	Eselon III			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
TI	TEKNOLOGI INFORMASI DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LKPP						
TI 01	Pengembangan Sistem Informasi	Terbatas	Eselon III			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
01.01	Perencanaan Sistem Informasi	Terbatas	Eselon III			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
01.02	Analisis	Terbatas	Eselon III			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
01.03	Rancangan Desain	Terbatas	Eselon III			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
01.04	Konstruksi	Terbatas	Eselon III			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi

						Informasi
01.05	Pengujian	Terbatas	Eselon III	yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi	
01.06	Implementasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi	
01.07	Panduan Penggunaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi	
TI 02	Pengelolaan Sistem Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi	
02.01	Permintaan Perubahan Aplikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi	
02.02	Pemeliharaan Aplikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi	
84						

85	TI 03	Data dan Informasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	03.01	Koleksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	03.02	Pemeliharaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	03.03	Statistik	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
86	TI 04	Pengembangan dan Pengamanan Jaringan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	04.01	Pengembangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Sistem Informasi

	04.02	Layanan	Terbatas	Eselon III	kinerja LKPP Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
87	TI 05	Dokumen Hosting	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
88	TI 06	Layanan Back-up Data Digital	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
89	TI 07	Dokumentasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik LKPP				
	07.01	Verifikasi Penyedia	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	07.02	Permohonan Admin Agency	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	07.03	Pelayanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Sistem Informasi

LAMPIRAN II
 PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI
 KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH

**KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	KODE KLASIFI KASI	SERIES / JENIS DOKUMEN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTER NAL	EKSTERNAL		
	PU	DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM					
1	PU.01	Pengkajian Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan

							Pengadaan Umum
01.01	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - Kajian/Memo Kebijakan / <i>Policy Brief</i> - Notula Penyusunan Kajian - Identifikasi Peraturan - Identifikasi <i>Best Practice</i> - Data Dukung/ <i>Evidence</i> - Hasil Survei/ Kuesioner Laporan Pendahuluan /Antara /Final Konsultan	Terbatas	Eselon II				Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
01.02	Peningkatan Partisipasi UMKM - Kajian/Memo Kebijakan / <i>Policy Brief</i> - Notula Penyusunan Kajian - Identifikasi Peraturan - Identifikasi <i>Best Practice</i> - Data Dukung/ <i>Evidence</i> - Hasil Survei/ Kuesioner Laporan Pendahuluan /Antara /Final Konsultan	Terbatas	Eselon II				Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

01.03	<p>Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kajian/Memo Kebijakan/Policy Brief</i> - <i>Notula Penyusunan Kajian</i> - <i>Identifikasi Peraturan</i> - <i>Identifikasi Best Practice</i> - <i>Data Dukung/Evidence</i> - <i>Hasil Survei/Kuesioner Laporan Pendahuluan/Antara/Final Konsultan</i> 	Terbatas	Eselon II		Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
01.04	<p>Kajian Pendukung Penyusunan Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kajian/Memo Kebijakan/Policy Brief</i> - <i>Notula Penyusunan Kajian</i> - <i>Identifikasi Peraturan</i> - <i>Identifikasi Best Practice</i> - <i>Data Dukung/Evidence</i> - <i>Hasil Survei/Kuesioner Laporan Pendahuluan/Antara/Final Konsultan</i> 	Terbatas	Eselon II		Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

2	PU 02	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum - Identifikasi Regulasi - Notula Penyusunan Kebijakan - Draf/Rancangan Kebijakan (Peraturan Presiden/Peraturan LKPP/Keputusan Deputi/Surat Edaran) - Surat - Rekomendasi/Usulan/Masukan/Tanggapan - Rapat antar Kementerian - Finalisasi Kebijakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
3	PU 03	Diseminasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	03.01	Bahan Paparan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu	Direktorat Pengembangan

									Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
									kinerja LKPP
									Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP
									Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
									Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP
									Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
									Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP
									Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
									Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP
									Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

								Umum
		- Laporan Pendahuluan, Antara dan Final Konsultan - Bahan Paparan Konsultan						
	PU 05	Penafsiran Peraturan Perundang-undangan						
	05.01	Layanan Penafsiran Peraturan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa - Surat Permintaan Penafsiran - Rancangan Tanggapan Permintaan Penafsiran - Surat Tanggapan Permintaan Penafsiran	Terbatas	Eselon II			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	KK	PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS						
4	KK 01	Penyusunan Kebijakan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Terbatas	Eselon II			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
	01.01	Penyusunan Peraturan tentang Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Terbatas	Eselon II			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan

								Khusus
01.02	Output Kebijakan	Terbatas	Eselon II				Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
01.03	Kajian Dampak Implementasi Peraturan tentang Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Terbatas	Eselon II				Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
01.04	Piloting Peraturan tentang Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Terbatas	Eselon II				Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
5	KK 02 Kajian/Pedoman Pengadaan Pertahanan Keamanan dan Keadaan Khusus	Terbatas	Eselon II				Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus

7	KK 04	Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	04.01	- Penelaahan Permohonan Pendampingan - Pelaksanaan Pendampingan - Penyusunan Laporan Pendampingan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
8	KK 05	Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha - Pengumpulan Bahan dan Informasi - Perumusan Model Dokumen Pengadaan - Finalisasi Model Dokumen Pengadaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
9	KK 06	Survei - Persiapan Survei	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu	Direktorat Pengembangan

									Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
10	KK 07	Sosialisasi		Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	
	07.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Standar dan Pedoman Teknis - Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha - Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - Evaluasi dan Pembuatan Laporan		Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	
11	IU	PENGEMBANGAN IKLIM USAHA							
	IU 01	Rumusan Strategi dan Kebijakan							
	01.01	Kajian		Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak	Direktorat	

							yang mengganggu kinerja LKPP	Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	01.02				Terbatas		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
12	IU 02				Terbatas		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	02.01				Terbatas		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
13	IU 03				Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/Diseminasi			

03.01	Sosialisasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
03.02	Kuliah Umum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
03.03	Bimbingan Teknis/ <i>Capacity Building</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
03.04	Seminar	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

	03.05	Diseminasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
14	IU 04	Sustainable Public Procurement	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
15	IU 05	Tingkat Komponen Dalam Negeri	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
16	IU 06	Usaha Mikro Kecil Menengah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

17	IU 07	Umum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
18	KI	PENGEMBANGAN KERJA SAMA INTERNASIONAL					
	KI 01	Multilateral					
	01.01	Pengembangan Kerjasama Internasional Bidang Pengadaan Barang/Jasa - Inventarisasi Masalah - Sosialisasi Hasil Kegiatan Harmonisasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	01.02	Kajian Kerjasama Ekonomi Internasional Bidang Pengadaan Barang/Jasa - Persiapan Negosiasi Kerjasama Internasional Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

	01.03	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan - Finalisasi 	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	01.04	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Hubungan Internasional - Inventarisasi Masalah - Keikutsertaan dalam Forum Internasional - Penyusunan Laporan Hasil 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
19	KI 02	Bilateral					
	02.01	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kerjasama Internasional Bidang Pengadaan Barang/Jasa - Inventarisasi Masalah - Sosialisasi Hasil Kegiatan Harmonisasi 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	02.02	<ul style="list-style-type: none"> Kajian Kerjasama Ekonomi Internasional Bidang Pengadaan Barang/Jasa - Persiapan Negosiasi Kerjasama 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama

	Internasional Bidang Pengadaan Barang/Jasa - Pelaksanaan - Finalisasi	Terbatas				Internasional
02.03	Peningkatan Hubungan Internasional - Inventarisasi masalah - Keikutsertaan dalam Forum Internasional - Penyusunan Laporan Hasil		Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
20	KI 03	Kajian Pengembangan Kerjasama Internasional				
03.01	Multilateral	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
03.02	Bilateral	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

21	KI 04	Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/Diseminasi						
	04.01	Bimbingan Teknis/ <i>Capacity Building</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	
	04.02	Sosialisasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	
	04.03	Seminar	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	
	04.04	Diseminasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama	

22	KI 05	Umum	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Internasional Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
23	PP	PERENCANAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH					
	PP 01	Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi					
	01.01	Penyusunan Pedoman Rencana Umum Pengadaan - Inventarisasi Masalah/Kajian dan Harmonisasi Peraturan - Pembahasan Draf - <i>Public Hearing</i> - Finalisasi - Laporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan
	01.02	Pengembangan Aplikasi Rencana Umum Pengadaan - Inventarisasi Masalah/Kajian	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan

25	ME.02	Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa							Pengadaan
	02.01	Penyusunan Alat Pengukuran Kinerja Pengadaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan		
	02.02	Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan		
	02.03	Pelaporan Evaluasi Kinerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan		
26	ME 03	Administrasi Penayangan Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa							

03.01	Check List Penayangan Daftar Hitam	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan
03.02	Penurunan Daftar Hitam	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan
03.03	Pengembangan Sistem Administrasi Daftar Hitam - Inventarisasi Masalah/Kajian - <i>Testing</i> aplikasi - Integrasi - Finalisasi - Laporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan
		Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan

27	ME 04	Sosialisasi Sistem Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan
28	ME 05	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengadaan
29	RK	RISET DAN KONTRAK					
	RK 01	Riset Pasar dan Industri					
	01.01	Analisis Hasil Riset Pasar/Industri Barang Jasa - Surat Usulan Barang/Jasa dari Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi/Penyedia - Surat Jawaban Usulan Barang/Jasa kepada Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi/Penyedia - Berkas Rapat (Undangan, Daftar	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

	- Nota Dinas Penayangan Pengumuman	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
02.02	Pemilihan Penyedia Melalui Non Lelang/Negosiasi - Dokumen Penawaran Penyedia - Berkas Rapat - Berita Acara - Nota Dinas - Laporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
02.03	Pemilihan Penyedia Melalui Lelang - Dokumen Penawaran Penyedia - Berkas Rapat - Berita Acara - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa - Nota Dinas - Laporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
02.04	Pembuatan Pedoman Kontrak Katalog - Berkas Rapat - Pedoman Kontrak Katalog	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

	- Nota Dinas - Laporan								
02.05	Pembuatan Kebijakan Sistem Katalog Elektronik - Berkas Rapat - Pedoman Kebijakan Sistem Katalog Elektronik - Nota Dinas - Laporan	Terbatas	Eselon II			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog		
02.06	Pembuatan Pedoman Tata Cara Pemilihan Penyedia - Berkas Rapat - Pedoman Tata Cara Pemilihan Penyedia - Nota Dinas - Laporan	Terbatas	Eselon II			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog		
02.07	Pelaksanaan Kontrak Payung - Berita Acara - Berkas Rapat - Dokumen Kontrak Katalog - Dokumen Surat Keputusan (SK)	Terbatas	Eselon II			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog		

	- Laporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
01.03	Pelatihan dan/atau Sosialisasi - Berkas Rapat (Undangan, Daftar Hadir, Notula) Pelatihan Input Data ke Aplikasi - Materi Pelatihan/Sosialisasi - Laporan					
32	Evaluasi Katalog					
02.01	Pembuatan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Katalog - Berkas Rapat - Pedoman Pengelolaan Katalog - Nota Dinas - Laporan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
02.02	Monitoring dan Evaluasi <i>e-Katalog</i> - Surat Permohonan Data - Laporan Jumlah Produk/Penyedia - Laporan Survei Kesesuaian (Harga, Produk, Profil Penyedia) - Berkas Rapat (Undangan, Daftar Hadir, Notula)	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

35	PA 03	Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	03.01	Bimbingan Teknis Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)					
	03.02	Manajemen Teknik Reguler - Sistem Pengadaan Secara Elektronik - Regulasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		- Aplikasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

03.03	Manajemen <i>Technics Admin</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
03.04	<i>Call Center</i> LPSE Nasional	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
03.05	<i>Monitoring dan Evaluasi Layanan</i> Pengadaan Secara Elektronik Nasional - Persiapan Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi - <i>Training International Organization for Standardization (ISO)</i> - Konsultasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik - Pembinaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

STANDAR KOMPETENSI DAN KELEMBAGAAN						
SK	Standar Kompetensi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
37	<p>SK 01</p> <p>01.01</p> <p>Diseminasi dan Pemantauan Implementasi Standar Kompetensi Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta Unit Kompetensi Standar Kompetensi Kerja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) - Laporan Konsultan - Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan 					
38	<p>SK 02</p> <p>02.01</p> <p>Kelembagaan Pengadaan</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan (SIULP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Konsultan Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan - Draf sampai dengan Finalisasi Buku Panduan Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan - Dokumen Uji Coba Aplikasi 	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

02.02	Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - Laporan Kegiatan dan Dokumentasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
02.03	Pembinaan Unit Layanan Pengadaan - Peraturan/Dasar Hukum Pembentukan Unit Layanan Pengadaan - SK Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan - Laporan Hasil PengadaanBarang/ Jasa Unit Layanan Pengadaan - Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembinaan Unit Layanan Pengadaan - Buku Kajian Akademis Unit Layanan Pengadaan - Formulir Konsultasi Unit Layanan Pengadaan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

	- Modul Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan - Laporan Konsultan						Profesi dan Kelembagaan
02.08	Fasilitas Program Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Percontohan Dalam Rangka Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Yang Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	
02.09	Pemilihan Unit Layanan Pengadaan Percontohan Fase II - <i>Memorandum of Understanding</i> Unit Layanan Pengadaan Percontohan - Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan ULP	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	
02.10	<i>Review</i> Modul	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	
02.11	Pendampingan Pengawasan <i>Mentoring</i> dan ULP Percontohan (Laporan)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	

									Kelembagaan
		- Lembar Kuesioner - Lembar Interviu - Hasil dan Rekomendasi <i>Monitoring</i> Evaluasi							
	SF	SISTEM DAN SARANA SERTIFIKASI							
41	SF 01	Sistem Sertifikasi							
	01.01	Dokumen Kebijakan meliputi Peraturan, Keputusan, Panduan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi		
42	SF 02	Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen							
	02.01	<i>International Standardization Organization (ISO) 9001:2015</i> - Panduan dan pedoman - Standar Operasional Prosedur (SOP) - Instruksi Kerja - Formulir	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi		

02.02	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKPP Berdasarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) - Panduan dan Pedoman - Standar Operasional Prosedur (SOP) - Skema Sertifikasi Kompetensi - Instruksi Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
02.03	- <i>Log Book</i> Keluhan dan Umpan Balik Pelanggan - Kuesioner Konsultasi Kepuasan Pelanggan	Terbatas	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
43	Sarana Sertifikasi					
03.01	Penyusunan Materi Uji Kompetensi dan Bank Soal	Rahasia	Eselon II (UKE II Terkait)		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	
03.02	Penyelenggaraan Peralatan Operasional Sertifikasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi

44	03.03	- Data dan Hasil Analisa Psikometri - Riwayat Analisa Butir Soal - Laporan Analisa Butir Soal	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	SF 04	Daftar Sarana dan Prasarana					
	04.01	Daftar Inventarisasi Sarana Habis Pakai	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	04.02	Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	04.03	Berita Acara Penyerahan Daftar Barang Milik Negara	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
	04.04	Daftar Pemeliharaan Sarana	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi

04.05	Check List Monitoring Prasarana	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
04.06	Formulir Monitoring Sarana Laboratorium Komputer	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
45	SF 05 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen					
05.01	Dokumen Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
05.02	Dokumen Teknis Aplikasi Sertifikasi	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
05.03	Database Sertifikasi termasuk <i>Back up</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
46	SF 06 Pembentukan dan Pembinaan Tempat Uji Kompetensi (TUK)					

06.01	Dokumen Permohonan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
06.02	Hasil Verifikasi (<i>Check List</i> Verifikasi TUK dan Berita Acara TUK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
06.03	Data Pengawas Ujian dan TUK	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
06.04	Berita Acara Rapat Komite Sertifikasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
47	SF 07	Pembentukan dan Pembinaan Asesor Kompetensi			
	07.01	Riwayat Penugasan Asesor	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
48	SF 08	Tata Kelola Sertifikasi			
	08.01	Dokumen Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu	Direktorat Sertifikasi

	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) - Surat Permohonan Penyelenggaraan Ujian - Surat Tugas Pengawas - Berita Acara Pengawasan Ujian - Dokumen Pertanggungjawaban Pengawasan Ujian - Daftar Hadir Peserta - Daftar Foto Peserta - Salinan Sertifikat - Dokumen Pendukung Lainnya - Jadwal Penyelenggaraan Ujian					kinerja LKPP dan instansi	Profesi
		Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi	
08.02	Dokumen Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Berbasis Kompetensi - Surat Permohonan Penyelenggaraan Ujian	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi	

09.03	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Ujian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
09.04	Rekapitulasi <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengawasan Ujian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
09.05	Jadwal Pengawasan Evaluasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
09.06	Laporan Semester, Triwulan, dan Tahunan Evaluasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
50	SF 10 Dokumen Surveilen				
10.01	Jadwal Pengawasan Surveilen	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
10.02	Formulir Surveilen dan Dokumen Pendukung Lainnya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
10.03	Berita Acara Hasil Surveilen	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak	Direktorat Sertifikasi Profesi

									Sertifikasi Profesi
10.04	Laporan/ <i>Feedback</i> Asesi	Terbatas	Eselon II					yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
10.05	Laporan Instansi	Terbatas	Eselon II					Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
10.06	Laporan Semesteran dan Tahunan Surveilien	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)				Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
HS	HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH								
51	HS 01	Pemberian Advokasi							
	01.01	Pemberian <i>Advice</i> terkait Pengadaan Barang Jasa	Terbatas	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah

									Daerah
01.02	Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> terkait Proses Pengadaan via Surat	Terbatas		Eselon II				Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
01.03	Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> terkait Proses Pengadaan via Web	Biasa/Umum/ Terbuka		Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
01.04	Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> terkait Proses Pengadaan via <i>Call Center</i>	Biasa/Umum/ Terbuka		Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)		Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Direktorat Advokasi Pemerintah	Direktorat Advokasi Pemerintah

								Pemerintah Daerah
02.02	Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> terkait Proses Pengadaan via Surat	Terbatas	Eselon II				Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
02.03	Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> terkait Proses Pengadaan via <i>Web</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	
53	HS 03 Pendampingan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat)		Tidak memiliki dampak yang	Direktorat Penanganan	

54	HS 04	Kemitraan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah			Umum)	mengganggu kinerja LKPP	Permasalahan Hukum
	04.01	Bimbingan Teknis	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	04.02	Pelatihan Peningkatan Kompetensi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	04.03	<i>Probity Advising</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
55	HS 05	Peningkatan Partisipasi Stakeholder					
	05.01	Seminar	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

05.02	<i>Workshop</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
05.03	<i>Forum Group Discussion (FGD)</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
05.04	Kompetisi Aplikasi Elektronik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
56	HS 06 Pengembangan Sistem Pelayanan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
57	HS 07 Procurement Knowledge Management	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

58	HS 08	Konsolidasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
59	HS 09	Penanganan Permasalahan Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	09.01	Permohonan Layanan Keterangan Ahli - Berita Acara Pemeriksaan - Gelar Perkara - Laporan Persidangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	09.02	Penugasan Ahli	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	09.03	Layanan Keterangan Ahli	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

09.04	Monitoring Evaluasi Layanan Keterangan Ahli	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
09.05	Seleksi Pemberi Keterangan Ahli - Pengumuman - Pendaftaran - Pengawasan Seleksi - Penilaian Hasil Seleksi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
09.06	Peningkatan Kapasitas Ahli - Undangan - Pendaftaran - Pengawasan Peningkatan Kapasitas - Penilaian Hasil Peningkatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
09.07	Penyamaan Persepsi dengan Aparat Penegak Hukum - Undangan - Konfirmasi - Pengawasan - Pelaporan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

09.08	Pengembangan Aplikasi Layanan Keterangan Ahli	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
60	HS 10				
10.01	Penanganan Permasalahan Kontrak Konsultasi Permasalahan Kontrak - Permintaan Konsultasi - Pemberian Tanggapan Konsultasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
10.02	Peningkatan Kapasitas Biro Hukum - Pengumuman dan Undangan - Pengawasan - Pelaporan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
10.03	Peningkatan Kapasitas Internal - Undangan - Pengawasan - Pelaporan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
10.04	<i>Monitoring</i> Penanganan Permasalahan Kontrak - Survei Peningkatan Kapasitas Biro Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

61	HS 11	- <i>Monitoring</i> Pengawasan Kegiatan Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
62	HS 12	Layanan Penyelesaian Sengketa	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	DL	PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA LKPP					
63	DL 01	Materi Pelatihan					
	01.01	Penyusunan Materi Pelatihan Keahlian PBJP - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar / Slide (<i>softcopy</i>) - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

	<p><i>Number (ISBN), dan lain-lain</i></p> <p>Penyusunan Materi Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar / Slide (<i>softcopy</i>) - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i>, dan lain-lain) 	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
01.02					
01.03	<p>Penyusunan Materi Pelatihan Jabatan Fungsional Jenjang Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar / Slide (<i>softcopy</i>) - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, 	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

01.07	Penyusunan Materi Pelatihan <i>Management of Training (MoT)</i> - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar / <i>Slide (softcopy)</i> - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> , dan lain-lain)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
01.08	Penyusunan Materi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Hukum PBJP - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar / <i>Slide (softcopy)</i> - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul,	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

			Eselon II	Terbatas	<p>Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i>, dan lain-lain)</p> <p>Penyusunan Materi Pelatihan Manajemen Resiko dalam Pekerjaan Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar / Slide (<i>softcopy</i>) - Dokumen pendukung lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Surat Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i>, dan lain-lain) 		Pusat Pendidikan dan Pelatihan
01.09	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP		Eselon II	Terbatas	<p>Penyusunan Materi Pelatihan Berdasarkan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurikulum - Buku Informasi (<i>softcopy</i>) - Buku Kerja (<i>softcopy</i>) - Bahan Ajar / Slide (<i>softcopy</i>) 		Pusat Pendidikan dan Pelatihan

03.05	Penyusunan Evaluasi Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa - Formulir Evaluasi Pelatihan - Rekapitulasi Data Hasil Evaluasi dan Analisa Data Evaluasi - Laporan Hasil Evaluasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
03.06	Pedoman Evaluasi Pelatihan Keahlian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Pertama - Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Muda - Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Madya - Formulir <i>Monitoring</i> , Rekap Data,	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

		Hasil <i>Monitoring</i> dan Analisa Data <i>Monitoring</i> , serta Laporan Hasil Evaluasi							
03.07		Laporan Penyelenggaraan Pelatihan dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan		
DL 04		Kajian							
04.01		Kajian Efektivitas Pelatihan - Sosialisasi - Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan		
04.02		Kajian Urgensi Pembentukan Pusdiklat - Naskah Akademik - Sosialisasi - Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan		
DL 05		Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pelatihan Kompetensi - Manual Mutu - Manual Manajemen Risiko - Standar Operasional Prosedur - Hasil Internal Audit <i>International</i>	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan		

70	DL 08	<ul style="list-style-type: none"> - Data Lembaga Penyelenggara Pelatihan - Data Narasumber / Pengajar - Jadwal Pelatihan - Data Program Pelatihan <p>Lembaga Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian (Pre Akreditasi, Akreditasi, Re-Akreditasi, Surveilien) - Surat Permintaan Akreditasi dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan - Dokumentasi Kegiatan Akreditasi dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan - Surat Jawaban Permintaan Akreditasi - Surat Tugas - Instrumen Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan - Fotokopi Surat Keputusan Akreditasi - Berita Acara dan <i>Check List</i> Asesmen Pendahuluan 	Biasa / Umum / Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pendidikan dan Pelatihan
							Pusat Pendidikan dan Pelatihan
							Pusat Pendidikan dan Pelatihan

10.01	Pengajar Pelatihan Meliputi Dokumentasi Kebijakan : - Surat Edaran - Panduan - Kerangka Acuan Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	10.02	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Pengajar/Narasumber - Laporan Penyelenggaraan - Soal Ujian <i>Training of Trainer</i>	Biasa/Umum/ Terbuka Terbatas	Eselon II Eselon II	Publik (Masyarakat umum) Publik (Masyarakat Umum)	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
10.03	Pengawasan Pengembangan Narasumber - Laporan Penyelenggaraan	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
10.04	Fasilitasi Pelatihan	Biasa/Umum/	Eselon II	Publik	Tidak memiliki	Pusat

	- Surat Permohonan Narasumber - Surat Jawaban Fasilitasi - Jadwal Pelatihan - Surat Tugas Pengajar	Terbuka		(Masyarakat Umum)	dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pendidikan dan Pelatihan
10.05	Data Pengajar Pengadaan Barang/Jasa	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
10.06	Data Pengajar <i>Training of Trainer</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
10.07	Konsultasi Pelatihan - Formulir Konsultasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

-
137
-